

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan sektor pariwisata, serta mengacu pada kerangka kapasitas organisasi dari Christensen dan Gazley (2008), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kapasitas Infrastruktur

Infrastruktur pariwisata di Kota Padang telah dibangun dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan. Fasilitas fisik seperti kantor, teknologi, dan akses jalan sudah tersedia, tetapi belum merata dan kurang terintegrasi lintas sektor. Di sisi lain, fasilitas non fisik seperti pelatihan, informasi, dan sistem digital juga mulai dikembangkan, namun belum menjangkau semua komunitas secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur pariwisata perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek bangunan dan teknologi, tetapi juga melalui sistem yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku wisata di lapangan.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dari sisi SDM, organisasi pemerintahan di Kota Padang menunjukkan kecukupan jumlah pegawai, keberagaman latar belakang pendidikan, dan ketersediaan pelatihan rutin. Dinas Pariwisata secara aktif melakukan pengembangan

kapasitas baik untuk pegawai internal maupun mitra eksternal seperti Pokdarwis dan komunitas. Meski begitu, evaluasi terhadap efektivitas pelatihan masih belum optimal, dan terdapat ketimpangan dalam distribusi pelatihan terhadap pelaku wisata nonformal.

3. Kapasitas Keuangan dan Manajerial

Pengelolaan anggaran pariwisata di Kota Padang bersumber dari APBD, DAK, PAD sektor pariwisata, dan dalam beberapa kasus, dukungan mitra swasta. Capaian realisasi anggaran cukup tinggi, namun efektivitas penggunaannya masih perlu ditingkatkan. Isu perencanaan yang belum selalu sinkron dengan realisasi, keterbatasan regulasi investasi, serta minimnya skema partisipasi swasta menjadi tantangan dalam memperkuat dimensi ini. Sistem manajerial lintas OPD juga masih menghadapi hambatan koordinatif yang mempengaruhi kelangsungan program secara lintas sektoral.

4. Kapasitas Lingkungan Eksternal

Dimensi ini menggambarkan sejauh mana aktor non-pemerintah, seperti komunitas dan sektor swasta, terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kota Padang. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya melalui pembentukan forum pentahelix dan pelibatan komunitas dalam Musrenbang Tematik serta program pelatihan. Namun, pelibatan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Akses informasi masih terbatas, dan peran sektor swasta, termasuk melalui skema CSR, belum terintegrasi secara optimal. Selain itu, belum banyak

tersedia forum strategis yang mendorong kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan mitra non-pemerintah.

Kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengembangkan sektor pariwisata sudah memiliki dasar kelembagaan yang cukup, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Fasilitas fisik dan non fisik telah dibangun, tetapi belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaku wisata. SDM terbatas secara jumlah dan kompetensi, koordinasi antar-OPD belum optimal, serta pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan responsif. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta mulai tumbuh, namun belum terintegrasi dalam pola kemitraan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penguatan kapasitas diperlukan di semua dimensi agar pengelolaan pariwisata menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berdampak nyata.

6.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan sektor pariwisata, berikut beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi perbaikan:

1. Pembangunan fasilitas yang merata dan sesuai kebutuhan pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan fasilitas pariwisata tidak hanya fokus pada kantor atau hal-hal administratif, tapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan. Untuk itu, pemerintah sebaiknya rutin mengecek apakah fasilitas yang sudah ada benar-benar

digunakan dengan baik, dan melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan sampai pelaksanaan.

2. Program pelatihan untuk pelaku wisata sebaiknya mencakup lebih banyak pihak, termasuk komunitas dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Penting juga untuk mengevaluasi hasil pelatihan, agar bisa dilihat apakah pelatihan tersebut benar-benar membantu dalam pengembangan pariwisata.
3. Perbaikan pengelolaan keuangan publik. Agar anggaran bisa digunakan lebih tepat, perlu ada kerja sama yang lebih baik antar dinas. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat aturan yang bisa mendorong keterlibatan pihak swasta, misalnya lewat CSR atau insentif untuk mereka yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata.
4. Keterbukaan informasi dan penggunaan data yang terpadu, karena Kota Padang perlu punya sistem informasi pariwisata yang rapi dan mudah diakses oleh masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha. Sistem ini harus bisa menunjukkan rencana kegiatan, pelaksanaan, dan hasilnya, agar semua pihak bisa ikut memantau dan bekerja sama.
5. Memperkuat peran masyarakat lewat kerja sama yang jelas, dan perlu dibentuk forum atau wadah komunikasi yang rutin dan terbuka untuk semua pihak, termasuk komunitas. Pemerintah juga bisa menjalin kerja sama resmi lewat perjanjian (MoU), dan menggunakan platform digital untuk mempermudah koordinasi dan pelaporan program.

6. Mendorong kerja sama yang jelas dengan pihak swasta. Pemerintah perlu membuat aturan atau kebijakan yang bisa menarik keterlibatan pihak swasta, seperti lewat CSR atau kerja sama dalam mengelola objek wisata. Agar kerja sama ini berjalan baik, harus ada aturan yang jelas, saling percaya, dan pembagian tugas yang adil.

Dengan perbaikan di atas, diharapkan pengelolaan pariwisata di Kota Padang bisa berjalan lebih baik, melibatkan banyak pihak, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

